



PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

REVIU RENCANA AKSI 2022

JL. LETJEND SUPRAPTO, CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT

TLP & FAX : 021-4254257
WEBSITE : WWW.PT-JAKARTA.GO.ID
E-MAIL : INFO.PTDKJAKARTA@MAIL.COM
IG : [@PENGADILANTINGGI_DKI_JAKARTA](https://www.instagram.com/@PENGADILANTINGGI_DKI_JAKARTA)



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa





PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Jalan Letnan Jendral Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257

Email : info.ptjakarta@gmail.com Website : www.pt-jakarta.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Rencana Aksi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai tata cara pelaksanaan Reviu. Substansi informasi yang dimuat dalam Rencana Aksi menjadi tanggung jawab Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Rencana Aksi 2022 telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Rencana Aksi ini.

Jakarta, 01 September 2022

Penanggung Jawab



Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.

Nip. 19560405 198203 1 005

REVIU SHEET
RENCANA AKSI Tahun 2022
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

RENCANA AKSI 2022 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di reviu menyelaraskan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

NO.	KOREKSI/SARAN/MASUKAN	HALAMAN
1	Perubahan Indikator pada Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 2022	2
2	Perubahan Target pada Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 2022	5



Jakarta, 01 September 2022

Penanggung Jawab

Soedarmadji
Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.
Nip. 19560405 198203 1 005



Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2022

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA YANG AGUNG”

dengan Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2022 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		• Perdata	95	95	95	95
		• Pidana	95	95	95	95
		• Tipikor	95	95	95	95
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	33	33	33	33
c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	3	3	3	3		

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		I	II	III	IV					
1	Melaksanakan persidangan dan minutası perkara masuk untuk perdata, pidana dan tipikor	v	v	v	v	Persidangan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan perkantoran dan layanan umum	Rp. 46.327.363.000,-
						Pertimbangan Hukum	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan perkantoran dan layanan umum	Rp. 46.327.363.000,-
						Putusan Hakim	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan perkantoran dan layanan umum	Rp. 46.327.363.000,-
						Jadwal Sidang / Court Calender	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan perkantoran dan layanan umum	Rp. 46.327.363.000,-
2	Melaksanakan dan minutası perkara perdata, pidana dan tipikor	v	v	v	v	Pencatatan Register	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan perkantoran dan layanan umum	Rp. 46.327.363.000,-
						Berkas Perkara Bundel B (Pengetikan PP)	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan perkantoran dan layanan umum	Rp. 46.327.363.000,-
						Salinan Putusan Kegiatan SIPP terlaksana	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan perkantoran dan layanan umum	Rp. 46.327.363.000,-
						Penetapan (Pembuatan dan Pengiriman)	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan perkantoran dan layanan umum	Rp. 46.327.363.000,-
						Pencatatan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan perkantoran dan layanan umum	Rp. 46.327.363.000,-

						Ceklist kelengkapan berkas	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan perkantoran dan layanan umum	Rp. 46.327.363.000,-
						Pengarsipan putusan	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan perkantoran dan layanan umum	Rp. 46.327.363.000,-
						Standar pelayanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan perkantoran dan layanan umum	Rp. 46.327.363.000,-
						Notulen	Program dukungan manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan perkantoran dan layanan umum	Rp. 46.327.363.000,-
3	Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat	v	v	v	v	Kuisisioner SKM	Program dukungan manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana Internal	Rp. 525.000.000,-
						Notulen	Program dukungan manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana Internal	Rp. 525.000.000,-
						Laporan/ Tabulasi	Program dukungan manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana Internal	Rp. 525.000.000,-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu				
		• Perdata	95	95	95	95
		• Pidana	95	95	95	95
		• Tipikor	95	95	95	95

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	DANA
		I	II	III	IV					
1	Melakukan upload data putusan ke dalam direktori putusan, satu hari setelah perkara putus	v	v	v	v	Putusan terpublikasi dalam direktori putusan Salinan Putusan Kegiatan SIPP terlaksana Kegiatan Pemantauan	Program dukungan manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana Internal	Rp. 525.000.000,-
2	Melaksanakan Pemantauan pengiriman salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju	v	v	v	v	Surat Pengantar	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Koordinasi, Sosialisasi dan Diseminasi, Perkara Hukum Perseorangan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara, Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan	Rp. 620.350.000,-
						Salinan Putusan	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Koordinasi, Sosialisasi dan Diseminasi, Perkara Hukum Perseorangan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara, Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan	Rp. 620.350.000,-
						Kegiatan SIPP terlaksana	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Koordinasi, Sosialisasi dan Diseminasi, Perkara Hukum Perseorangan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara, Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan	Rp. 620.350.000,-
						Kegiatan Pemantauan	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Koordinasi, Sosialisasi dan Diseminasi, Perkara Hukum Perseorangan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara, Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan	Rp. 620.350.000,-
						Kegiatan Pemantauan	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Koordinasi, Sosialisasi dan Diseminasi, Perkara Hukum Perseorangan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara, Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan	Rp. 620.350.000,-



Ketua,

Soedarmadji, SH., M.Hum
Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum
 NIP. 19560405 198203 1 005



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10-U/150/KP.01.1/9/2022**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU (IKU), RENSTRA, PKT, DAN RKT TAHUN 2022
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

- Menimbang** : 1. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI maka perlu untuk dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
2. bahwa berdasarkan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) serta adanya perubahan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka perlu penetapan IKU, RENSTRA, PKT dan RKT Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang Undang Nomor : 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1703/SEK/OT.01.2/7/2022 tentang Penginputan / Update Data Capaian Kinerja pada Aplikasi e-SAKIP Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Penetapan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2022

Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.H.
NIP. 19560405 198203 1 005



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10-U/134 /KP.01.1/7/2022**

TENTANG

**TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI maka perlu untuk dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

b. bahwa untuk melaksanakan Reviu IKU, RENSTRA, PKT dan RKT tahun 2022 maka perlu untuk dibentuk Tim;

c. bahwa nama – nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Reviu IKU, RENSTRA, PKT dan RKT tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1703/SEK/OT.01.2/7/2022 tentang Penginputan/Update Data Capaian Kinerja pada Aplikasi e-SAKIP Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.**

Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk menetapkan RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama IKU, RENSTRA, PKT dan RKT bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu – isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 Juli 2022

[Handwritten Signature]
DR. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum
NIP. 195604051982031005

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 Nomor : W10-U/134/KP.01.1/7/2022
 Tanggal : 28 Juli 2022
 Tentang :

**TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022
 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN
1	Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum. NIP. 195604051982031005	Ketua	Pembina
2	Heru Pramono, S.H., M.Hum NIP. 196111191985121001	Wakil Ketua	Ketua Tim
3	Bukaeri, SH., MM NIP. 19621006 198303 1 005	Panitera	Wakil Ketua Tim
4	Sudiyanto, S.H., M.H. NIP. 19691130 199203 1 001	Sekretaris	Sekretaris Tim
5	Tony Pribadi, S.H., M.H. NIP. 19570725 198612 1 001	Hakim Tinggi	Koordinator
6	H. Edwarman, S.H. NIP. 19560815 198303 1 005	Hakim Tinggi	Anggota
7	H. Mulyanto, S.H., M.H. NIP. 19570502 198403 1 001	Hakim Tinggi	Anggota
8	Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H. NIP. 195509081985121001	Hakim Tinggi	Anggota
9	Itjah Minantika, SE.,SH.,MH NIP. 19770530 200502 2 001	KaBag. Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
10	Sabrina Napitupulu, SE., MH NIP. 19661012 200604 2 001	KaBag Umum dan Keuangan	Anggota
11	Jul Rizal, SH., MH NIP. 19610731 198303 1 004	Panitera Muda Perdata	Anggota
12	Sutrisno Bardi SH., MH NIP. 19601010 198103 1 008	Panitera Muda Pidana	Anggota
13	Watty Wiarti, SH., MH NIP. 19630327 198503 2 002	Panitera Muda Hukum	Anggota
14	L.R Sophan Girsang, SH., MH NIP. 19620613 198912 1 003	Panitera Muda Khusus Tipikor	Anggota
15	Amir Nurllah, SH NIP. 19810725 200112 1 003	Kasub. Bag TU & RT	Anggota
16	Dwinanto, SE., SH NIP. 19810525 200904 1 001	Kasub.Bag Keu & Pelaporan	Anggota
17	Destian Bimantoro, S.Kom NIP. 19851213 201101 1 007	Kasub Bag. Kepegawaian dan TI	Anggota
18	Indah Pratiwie, S.E., M.M. NIP. 198806262011012025	Kasub Bag. Renprog & Ang	Anggota
19	Budiarto, S.H., M.H. NIP. 19740112 199403 1 001	Panitera Pengganti	Anggota

KETUA,


 Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum
 NIP. 195604051982031005



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10.U/157 /KP.01.1/9/2022**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU RENCANA AKSI TAHUN 2022
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka perlu adanya penyesuaian kegiatan dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Reviu serta adanya perubahan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka perlu penetapan Reviu Rencana Aksi Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 - 5. Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA AKSI TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**
- Kesatu** : Menetapkan Reviu Rencana Aksi Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum pada lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 September 2022
KETUA



f Dr. H. SOEDARMAJDI, S.H., M.Hum. b
NIP. 19540807 198303 1 003



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10-U/139.b/KP.01.1/7/2022**

TENTANG

**TIM PENYUSUN REVIU RENCANA AKSI TAHUN 2022 PADA
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Reviu Rencana Aksi Tahun 2022 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka perlu untuk dibentuk Tim;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Reviu Rencana Aksi Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG
TIM PENYUSUN REVIU RENCANA AKSI TAHUN 2022 PADA
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.**
- Kesatu** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk melakukan penyusunan Reviu Rencana Aksi Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- Kedua** : Dalam penyusunan Reviu Rencana Aksi berpedoman pada Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
- Ketiga** : Agar melaksanakan tugas penyusunan Reviu Rencana Aksi paling lambat bulan Januari 2023 dan melaporkan hasilnya pada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2022



Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.
NIP. 195604051982031005

**TIM PENYUSUN REVIU RENCANA AKSI TAHUN 2022
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN
1.	Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum NIP. 19560405 198203 1 005	Ketua	Pembina
2.	Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. NIP. 19611119 198512 1 001	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Bukaeri, S.H., M.H. NIP. 19621006 198303 1 005	Panitera	Wakil Ketua Tim
4.	Sudiyanto, S.H., M.H. NIP. 19691130 199203 1 001	Sekretaris	Sekretaris Tim
5.	Tony Pribadi, S.H., M.H. NIP. 19570725 198612 1 001	Hakim Tinggi	Koordinator
6.	H. Edwarman, S.H. NIP. 19560815 198303 1 005	Hakim Tinggi	Anggota
7.	H. Mulyanto, S.H. M.H. NIP. 19570502 198303 1 005	Hakim Tinggi	Anggota
8.	Itjah Minantika, S.E., S.H., M.H NIP. 19770530 200502 2 001	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
9.	Sabrina Napitupulu, S.E., M.H NIP. 19630327 198503 2 002	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
10.	Jul Rizal, S.H., M.H NIP. 19610731 198303 1 004	Panitera Muda Perdata	Anggota
11.	Sutrisno Bardi, S.H., M.H NIP. 19601010 198103 1 008	Panitera Muda Pidana	Anggota
12.	Watty Wiarti, S.H., M.H NIP. 19630327 198503 2 002	Panitera Muda Hukum	Anggota
13.	L.R Sophan Girsang, S.H., M.H NIP. 19620613 198912 1 003	Panitera Muda Khusus Tipikor	Anggota
14.	Amir Nurllah, S.H NIP. 19810725 200112 1 003	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
15.	Dwinanto, S.E., S.H NIP. 19810525 200904 1 001	Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
16.	Destian Bimantoro, S.Kom NIP. 19851213 201101 1 007	Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan TI	Anggota
17.	Indah Pratiwie, S.E., M.M. NIP. 19880626 201101 2 025	Kepala Sub. Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
18.	Budiarto, S.H., M.H. NIP. 19740112 199403 1 001	Panitera Pengganti	Anggota

KETUA

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.
NIP. 195604051982031005